

Berharap Cemas dari Pemilukada Jabar

REALITAS politik Pilgub Jabar 2013 cenderung lebih memilih dimensi popularitas sosok ketimbang mengedepankan kualitas dan kababilitas teruji kader-kader partai politik. Harus diakui, munculnya popularitas figur *infotainment* adalah tren masa kini. Mereka dianggap lumbung suara bagi partai politik menjelang pemilukada karena dinilai efektif sebagai *vote getter*.



Dadang Iskandar

Dosen Kopertis IV Jabar Banten
dpk FKIP Unpas Bandung

PENGGIRINGAN bakal calon dari sisi keterujian visi misi, kualitas, dan pengalaman pengabdian publik sudah tak dihiraukan dan bukan menjadi tahapan inti dari persoalan kepemimpinan. Selama popularitas dapat dijual dan meyakinkan publik, selama itu pula (dianggap) bukan menjadi persoalan. Padahal, di hadapan pundak masing-masing telah menanti sejumlah persoalan sosial kemasyarakatan yang sangat berat yang siap “menerkam”.

Dalam setiap pemilukada, kepopulisan (baca: popularitas) yang dipolitisasi masih dipandang efektif untuk meraup keuntungan kantong suara, lebih lagi di tatanan *grassroot* yang telah dibangun kulturnya oleh partai politik. Jual “jago” bukan ayam kampung, itulah nuansa politis yang berkembang ketika penobatan bakal calon ditawarkan kepada publik setelah dipoles oleh kata-kata integritas, kredibilitas, serta kulturalis dalam kepemimpinan daerah.

Memiliki integritas semata sebenarnya tidak cukup bagi seorang pemimpin. Meski menurut John C Maxwell, integritas adalah faktor kepemimpinan yang utama. Yang terpenting adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan dalam memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Kesatuan dalam hal ini berarti adanya konsistensi antara apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat.

Apa yang kita lihat ketika kata integritas diapitkan dengan bakal calon dalam pemilukada tidak serta-merta dapat dirumuskan kembali ketika dia terpilih pada pucuk kepemimpinan daerah. Umumnya, jauh panggang dari api. Apa yang dibangun setelah itu? Hanya meneruskan tampuk kepemimpinan pendahulunya yang tergeser oleh ketidakberdayaan atas minimnya suara atau tidak terpilih kembali lantaran batasan undang-undang yang mengharuskannya berhenti (masa

periode).

Pemilukada Jawa Barat saat ini adalah fenomenal unik yang mampu menggeser tokoh-tokoh daerah yang berada dalam lautan birokrasi, akademis, bahkan dari kalangan organisasi keagamaan. Kemunculan figur dari kalangan *infotainment* lebih maju selangkah dan cepat merespons karena diwadahi oleh mesin politik partai politik. Bukan persoalan suka atau tidak suka atas “ekspansi” ini, tetapi itulah paradoks yang terjadi.

Pertanyaan yang muncul, apakah fenomena ini telah menjadi bagian dari atmosfer demokrasi yang terjadi di Jawa Barat yang mengharuskan mereka menduduki peran penting dalam pengembangan daerah berpenduduk sekitar 45 juta jiwa? Meski dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa kedudukan semua anak bangsa Indonesia sama atas hak-hak politiknya, bagaimanapun popularitas juga harus bisa diukur oleh parameter kepemimpinan yang lebih jelas dan terbuka di hadapan publik.

Meski, pada sisi lain, harus diakui pula kesuksesan “figur selebriti” dalam memenangi pemilukada mencerminkan perubahan sikap pemilih yang kurang percaya terhadap calon dari kalangan birokrat ataupun politisi. Bahkan, bisa jadi feno-

mena ini menjadi sebuah refleksi ketidakpercayaan publik pemilih terhadap para calon pemimpinnya.

Persoalan yang krusial tentunya bukan saja hitung-hitungan “kalah menang” matematis politis yang dibangun oleh partai politik, melainkan juga kemampuan mewujudkan janji penyejahteraan rakyat yang diamatkan oleh undang-undang. Artinya, jika belum memiliki konsep utuh yang jelas dan matang dalam perpolitikan, jangan asal terjun.

Satu hal yang jarang tersadari adalah ketika pencalonan dari kalangan selebriti untuk menduduki posisi dalam birokrasi, seperti diusung sejumlah partai politik, ada kecenderungan hanya dimanfaatkan semata sebagai *vote getter* guna memperoleh keuntungan pencitraan partai politik.

Bagaimanapun, hemat penulis, popularitas saja sebagai modal terjun dalam kancah suksesi kepemimpinan politik tidak cukup. Popularitas tidak identik dengan kemahiran dalam berorganisasi politik dan bagaimana mengarahkan politik bagi kemaslahatan bersama. Namun, semua itu akan berputar kepada pemilih, sosok mana yang pantas untuk duduk di kursi kepemimpinan Jawa Barat untuk lima tahun ke depan.
